

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Agency Theory**

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terlebih untuk perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), seringkali terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan. Disamping itu, untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka modal sendiri (ekuitas) yang telah disetorkan oleh para pemilik perusahaan mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi pemilik tidak akan diikutsertakan untuk menutup kerugian tersebut (Husnan dan Pudjiastuti; 2006).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Efendi (2013) menjelaskan hubungan keagenan didalam teori agensi (*Agency Theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Agency Theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pemegang saham sebagai pihak

*principal* mengadakan kontrak untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi (Sugiarto; 2009).

Sedangkan menurut Halim (2005) masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari *agent*, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan *principal*. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari *principal*.

Warsono (2009) menjelaskan bahwa terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham. Hak voting pemegang saham merupakan bagian penting dari aset keuangan mereka. Kedua, pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang saham secara kolektif melakukan negosiasi terhadap manajer (mewakili perusahaan) berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi mereprestasikan suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer.

Manajemen laba didasari oleh adanya *Agency Theory* yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep *Agency Theory* adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* memperkerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan *principal*.

Eisenhardt (1989) dalam Darmawati (2005) berpendapat bahwa teori keagenan mampu mengatasi dua permasalahan dalam hubungan keagenan. Pertama, adalah masalah keagenan yang timbul ketika (a) adanya keinginan dan tujuan yang bertolak belakang antara *principal* dan agen, dan (b) kesulitan principal dalam memverifikasi apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan manajemen. Kedua, permasalahan pembagian resiko akibat perbedaan sikap *principal* dan *agent*.

### **2.1.2 Asimetri Informasi**

Menurut Jogiyanto (2010:387) asimetri informasi adalah "...kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki."

Sejalan dengan pengertian di atas, Suwarjono (2014:584) menyatakan bahwa asimetri adalah "...kondisi dimana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor/kreditur."

Selanjutnya Mamduh M. Hanafi (2014:217) mengemukakan bahwa asimetri adalah dimana "...pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, sedangkan pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar."

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-

individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal* sebagai pemilik. Sehingga dengan adanya asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka meningkatkan utilitasnya. Fleksibilitas manajemen untuk memmanajemenkan laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba.

Menurut Dai *et al.*,(2013) dalam Andrie dan Nur Cahyonowati (2015) terjadinya asimetri informasi di suatu perusahaan dapat mempengaruhi tingkat praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Kecenderungan manajemen mengotak-ngatik besarnya laba perusahaan demi tujuan untuk memaksimalkan nilai agar terlihat kondisi perusahaan tersebut baik. Manajemen laba merupakan praktik yang digunakan perusahaan untuk mencapai laba sesuai keinginan dari perusahaan agar terlihat baik. Kualitas laba yang baik merupakan cerminan dari kondisi suatu perusahaan.

### **2.1.3 Kepemilikan Keluarga**

#### **2.1.3.1 Struktur Kepemilikan**

Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Berikut penulis mengemukakan beberapa definisi kepemilikan saham yang dinyatakan oleh para ahli diantaranya:

Menurut Sugiarto (2009:59) struktur kepemilikan adalah “...perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor.”

Menurut I Made Sudana (2011) struktur kepemilikan adalah “...pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan, dimana pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan.”

Menurut Kharis Raharjo (2016) dalam Rezky (2017) struktur kepemilikan adalah “...proporsi kepemilikan manajemen, institusional, dan kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham.”

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan adalah informasi tentang pemisahan antara kepemilikan saham perusahaan yang terdiri dari pemegang saham selaku pihak yang menyertakan modal serta manajer selaku pihak yang ditunjuk oleh pemilik saham untuk mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada pemilik saham.

Berdasarkan penelitian Siregar dan Utama, struktur kepemilikan saham dibedakan menjadi dua, yaitu struktur kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan institusional. Menurut Yana dan Wati dalam Bernandhi (2013) Struktur kepemilikan manajerial adalah “...tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Pengukurannya dilihat dari besarnya proporsi saham yang dimiliki manajemen pada akhir tahun yang disajikan dalam bentuk presentase.”

Born dalam Efendi (2013), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah “...presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris.”

Menurut Imanta dan Satwiko (2011:68) definisi kepemilikan manajerial adalah “...kepemilikan saham oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki oleh manajer yang dinyatakan dalam presentase sehingga manajer sekaligus sebagai pemegang saham.

Menurut Efendi (2013) adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebagai akibat dari kepemilikan manajemen yang meningkat dalam perusahaan tersebut. Hal ini sangat potensial dalam mengurangi alokasi sumber daya yang tidak menguntungkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Cho dan Mark dalam Efendi (2013) menyatakan hubungan struktur kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan merupakan hubungan non-monotonik. Hubungan non-monotonik antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan disebabkan adanya insentif yang dimiliki oleh manajer dan mereka cenderung berusaha untuk melakukan penjejakan kepentingan dengan *outside owners* dengan cara meningkatkan kepemilikan saham mereka jika nilai perusahaan yang berasal dari investasi mengalami peningkatan.

Menurut Nabela (2012:2) kepemilikan institusional adalah “...proporsi saham yang dimiliki oleh institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase.”

Nuraina (2012:6) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah “...presentase saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain).”

Braley dan Marcus dalam Fandini (2013) mendefinisikan bahwa kepemilikan institusional adalah “...beberapa saham yang dipegang langsung oleh para investor individu tetapi proporsi yang besar dimiliki oleh lembaga keuangan seperti reksa dana, dana pension, dan perusahaan asuransi.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pension, atau perusahaan lain yang diukur dengan presentase pada akhir tahun.

Braley dan Marcus dalam Fandini (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajet dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan saham institusional disebutkan oleh Permanasari (2010) sebagai berikut :

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Nuraina (2012:12) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis

sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manajemen laba. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

### **2.1.3.2 Pengertian saham**

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Menurut Sapto (2006:31) saham adalah "...surat berharga yang merupakan instrument bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan."

Menurut Husnan Suad (2008:29) saham merupakan "...secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya."

Selanjutnya, menurut Fahmi (2012:81) saham merupakan "...kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya."

Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

### 2.1.3.3 Jenis-jenis Saham

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2016:6), ada beberapa jenis saham yaitu:

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas:
  - a. Saham biasa (*common stock*), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling *junior* terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
  - b. Saham preferen (*preferred stock*), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor.
2. Dilihat dari cara pemeliharannya, saham dibedakan menjadi:
  - a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
  - b. Saham atas nama (*registered stock*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan menjadi:
  - a. Saham unggulan (*blue-chip stock*), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
  - b. Saham pendapatan (*income stock*), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
  - c. Saham pertumbuhan (*growth stock-well known*), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock lesser known*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai *leader* dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*.
  - d. Saham spekulatif (*speculative stock*), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

#### **2.1.3.4 Pengertian Kepemilikan Keluarga**

Salah satu struktur kepemilikan yang sering dimiliki perusahaan adalah kepemilikan individu yang biasanya dijabat oleh keluarga dalam istilah lain disebut kepemilikan keluarga. Berikut definisi kepemilikan saham berdasarkan para ahli:

Chaney *et al.* (2011) dalam Adiarti (2015:36) mendefinisikan "...perusahaan yang dimiliki oleh keluarga sebagai suatu perusahaan yang kepemilikan terbesarnya adalah keluarga atau terdapat kepemilikan dari seorang individu sebesar 20%."

Chi *et al* (2014) dalam Adiarti (2015:36) mendefinisikan "... suatu perusahaan di miliki keluarga apabila suatu keluarga memiliki kepemilikan akhir sebesar 10% atau lebih dan keluarga memiliki jabatan pada jajaran direksi atau dewan komisaris."

Kepemilikan keluarga menurut Arifin (2003) dalam Siregar Utama (2008:42) adalah "...meliputi perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan yang terdaftar di bursa (kepemilikan > 5%) tidak termasuk pemerintah, lembaga keuangan, atau publik."

Sedangkan menurut Claessens, *et al*, (2000) dalam Warsini dan Rossietta (2013) kepemilikan keluarga dapat diukur dengan "...besarnya presentase kepemilikan individu ditambah presentase kepemilikan perusahaan selain perusahaan publik, pemerintah, manajemen, institusi lembaga keuangan dan kepemilikan asing."

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan kepemilikan keluarga adalah perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh seorang individu setidaknya lebih dari 5% dari total saham perusahaan.

### 2.1.3.5 Struktur Kepemilikan Keluarga Indonesia

La Porta *et al.* (1999) dalam Adiarti (2015) mengemukakan bahwa hampir sebagian besar struktur kepemilikan perusahaan di luar negara Amerika Serikat memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi. Terutama pada negara yang memiliki perlindungan investor yang lemah. Penemuan ini dikonfirmasi oleh Claessens *et al.* (2000) yang melakukan penelitian terhadap struktur kepemilikan di 2.980 perusahaan terbuka di sembilan negara Asia Timur dimana salah satunya adalah Indonesia. Claessens *et al.* (2000) mengidentifikasi struktur kepemilikan dengan cara melakukan penghitungan hak arus kas dan hak kontrol yang ditelusuri hingga mencapai kepemilikan ultimat. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa struktur kepemilikan di Asia Timur memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi dimana control oleh pemegang saham pengendali diperoleh melalui melalui struktur piramida. Selain itu Claessens *et al.* (2000) juga menemukan bahwa 60 % dari perusahaan yang dikategorikan memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi dikontrol oleh keluarga sebagai pemilik ultimat.

Claessens *et al.* (2000) menemukan bahwa diantara sembilan negara bagaian yang menjadi sampel penelitiannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pola konsentrasi kepemilikan control terbesar dimana kepemilikan dan kontrol tersebut didominasi oleh keliuarga. Terkonsentrasinya struktur kepemilikan di Indonesia dilatarbelakangi oleh dianutnya *civil law* sebagai pendekatan sistem hukum. Bila dikaitkan dengan besaran rasio hak kontrol terdapat hak arus kas, Indoenesia juga merupakan salah satu negara dengan rasio terbesar setelah Jepang dan Singapura. Claessens *et al* (2000) juga mengemukakan bahwa Indonesia memiliki mekaniseme rantai kepemilikan terbesar diantara delapan negara lainnya. Dominasi kepemilikan piramida ini akan berimplikasi pada tingginya potensi praktik ekspropriasi di Indonesia (Diyanty, 2012).

Penelitian terhadap perkembangan kepemilikan di Asia Timur dan Indonesia kembali dilakukan oleh Carney dan Child (2013). Dalam hasil penelitiannya, dikemukakan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga di Indonesia adalah sebesar 57,3% atau mengalami penurunan sebesar 11,3% dari hasil penelitian Claessens *et al.* (2000) (Carney dan Child, 2013 dalam Adiarti, 2015).

Fisman (2001) dalam Stanley (2016) mengemukakan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi di Indonesia didominasi oleh keluarga semenjak era kepemimpinan keluarga Soeharto. Semenjak era kepemimpinan Soeharto, munculah grup bisnis yang dikendalikan oleh keluarga seperti Bob Hasan (Grup Nusamba), Liem Sioe Liong (Grup Salim), dan Prajogo Pangestu (Grup Barito Pacific). Setelah era kepemimpinan Soeharto berakhir, munculah nama-nama baru di dunia bisnis Indonesia seperti Abu Rizal Bakrie (Grup Bakrie), Hary Tanoesoedibyo (Grup Bhakti atau MNC *group*), keluarga Widjaja (Grup Sinarmas), Mu'min Ali Gunawan (Grup Panin), keluarga Hartono (Grup Djarum), dan Mochtar Riady (Grup Lipo).

#### **2.1.3.6 Pengukuran Kepemilikan Keluarga**

Kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai "...presentase kepemilikan saham perusahaan oleh anggota keluarga, dimana kepentingan keluarga terhadap perusahaan akan semakin besar seiring dengan peningkatan jumlah presentase saham tersebut." Dalam penelitian Adiarti (2015), kepemilikan keluarga diukur dengan cara menghitung presentase pengendali akhir dan mengaitkan hubungan kekerabatan pada pengendali akhir.

Dalam penelitian Stanley (2016), perusahaan dianggap memiliki kepemilikan keluarga apabila "...keseluruhan individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5%

ke atas yang wajib dicatat), kecuali perusahaan asing, perusahaan publik, negara, institusi keuangan (seperti asuransi, dana pensiun, lembaga investasi, reksa dana) dan masyarakat yang kepemilikan individu kurang dari 5% (tidak wajib dicatat).”

Chaney *et al.* (2011) dalam Adirati (2015) mendefinisikan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga sebagai suatu perusahaan yang “...kepemilikan terbesarnya adalah keluarga atau terdapat kepemilikan dari seorang individu sebesar 20%.” Harijono (2013) dalam Sri Rezeki (2015) menjelaskan kepemilikan keluarga dapat diukur dengan diukur dengan “...besarnya jumlah saham individu ditambah jumlah saham perusahaan selain perusahaan publik, pemerintah, manajemen, institusi lembaga keuangan dan kepemilikan asing.”

$$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{Jumlah Saham individu} + \text{jumlah saham perusahaan}}{\text{Total Saham beredar}} \times 100\%$$

## **2.1.4 Hubungan Politik**

### **2.1.4.1 Pengertian Hubungan**

Hubungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kontak atau ikatan atau pertalian (keluarga, persahabatan, dan sebagainya). Dalam bahasa Inggris hubungan disebut *connection* atau dalam bahasa Indonesia disebut koneksi. Koneksi menurut KBBI adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan).

Menurut Tams Jayakusuma (2001:25), hubungan adalah “... suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan merupakan ikatan dan proses yang dapat membantu memudahkan segala kegiatan, agar seluruh kegiatan dapat berjalan tanpa hambatan.

#### **2.1.4.2 Pengertian Politik**

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “Polis” yang artinya sama dengan kota atau negara kota. Diambil dari kata *polis* tersebut timbul istilah lain yaitu *polite* yang berarti warga negara dan *Politicos* yang berarti kewarganegaraan, dan selanjutnya orang-orang Romawi mengambil istilah tersebut serta menamakan pengetahuan tentang negara sebagai kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan.

Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Berikut pengertian politik menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut Ramlan Surbakti (1999:1) bahwa definisi politik adalah “... interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.”

Menurut F. Isjwara, (1995:42) poliitk adalah “... suatu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan.”

Menurut Kartini Kartono (1986:64) bahwa politik dapat diartikan “... sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku di tengah masyarakat.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa politik adalah ilmu dan aktivitas yang melibatkan pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan keputusan untuk kepentingan bersama suatu negara.

#### **2.1.4.3 Pengertian Hubungan Politik**

Purwoto (2011:7) mengemukakan bahwa “... perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.”

Faccio (2006:369) dalam Andriana dan Yeterina (2016) Menjelaskan bahwa “...Perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan politik apabila paling tidak salah satu dari pimpinan perusahaan, pemegang saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki), atau kerabat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, atau pengurus partai yang menjadi perwakilan di parlemen.”

Adhikari (2006:538) juga menjelaskan bahwa “... hubungan politik suatu perusahaan dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan politik adalah hubungan yang dapat membantu perusahaan dalam aktivitas pemerintahan, sehingga perusahaan mendapat kemudahan dalam melaksanakan kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan kenegaraan.

#### **2.1.4.4 Manfaat Hubungan Politik**

Faccio (2006) dalam Sriayu (2018) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik memiliki tiga sumber potensi manfaat yaitu :

1. Akses istimewa ke kredit,
2. Diskon pajak,
3. Kekuatan pasar.

## **2.1.5 Agresivitas Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Pajak**

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam Mardiasno (2016:1) mendefinisikan bahwa pajak merupakan "... iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Waluyo (2011:2) menjelaskan bahwa pajak adalah "... prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi da semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran."

M.J.H Smeets dalam Sukrino Agoes (2014:6) mengemukakan bahwa pajak adalah "... prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang ditunjukan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah."

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai "... kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, denga tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarya kemakmuran rakyat."

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang tidak

mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat.

### 2.1.5.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2016:8):

#### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

##### a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

##### b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

##### c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### 2. Asas Pemungutan Pajak

##### a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

##### b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

- c. Asas kebangsaan
- d. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

#### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.

#### c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### 2.1.5.3 Pengertian Agresivitas

Agresivitas memiliki kata dasar agresi yang merupakan salah satu bentuk perilaku yang dimiliki oleh setiap orang. Berkowitz (1993) dalam F.Podungge (2014) mengemukakan bahwa secara umum agresi merupakan "... segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis."

Baron dan Byrne (1994) dalam F. Podungge (2014) bahwa "... perilaku agresif adalah perilaku individu yang berujuan untuk melukai atau mencelekakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingah laku tersebut."

Krahe, (1997) dalam Hanurawan, (2010:83) mengemukakan bahwa "... pengalaman frustrasi seseorang dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk bertindak agresi mengarah pada sumber-sumber eksternal yang menjadi sebab frustrasi dan keinginan itu akhirnya dapat memicu timbulnya perilaku agresi secara nyata."

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agresivitas adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti pihak lain baik itu mahluk hidup ataupun objek benda lain, baik itu secara fisik maupun secara non fisik yang disebabkan karena rasa frustasi dari sumber-sumber eksternal.

#### **2.1.5.4 Pengertian Agresivitas Pajak**

Frank *et al.*,(2009) dalam Stanley, (2016) Agresivitas pajak didefinisikan sebagai "... tindakan yang dilakukan manajemen dalam mengurangi laba kena pajak melalui perencanaan pajak dengan cara *tax avoidance* dan *tax evasion*."

Perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* terletak pada cara yang digunakan. *Tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah pajak dalam peraturan, sehingga sah di depan hukum (Dyreng *et al*, 2008 dalam Stanley, 2016), contohnya wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak dan berusaha agar pembayaran pajak ditunda. Namun, *tax evasion* dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, contohnya wajib pajak sengaja tidak

melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak. Dalam penelitian ini, penggunaan agresivitas pajak mengcau pada tax avoidance ataupun perencanaan pajak yang tidak mengindikasikan aktivitas tidak patut.

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) dalam Sri Ayu (2017:56) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan "... usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang atau aturan lain yang berlaku."

Penghindaran pajak menurut Bernard P. Heber dalam Nurmantu (2005:151) adalah "... upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam Undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah."

Menurut Hary graham dalam Siti Kurnia (2010:147) penghindaran pajak adalah "... usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan celah pajak namun yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan."

Sedangkan menurut Robert H. Anderson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah "... cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan."

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agresvitas pajak dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi, memanfaatkan, dan melepaskan beban pajak namun tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.1.5.4 Pengukuran Agresivitas Pajak

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak. Setidaknya ada dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010; dalam Sri Ayu, 2017:58), di mana disajikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)**

No	Pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total Income expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide Current Income expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide Cash Taxes expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide Cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over years divided by the sum of pre-tax earnings over years
5	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{Differential} \times \text{Pre tax book income} = a + bx$ Control + e	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTM	Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S.	The total difference

		$STR)-(NOL_t - NOL_{t-1})$	
8	Temporary BTB	Deferred tax expense/U.S.STR	between book and taxable income The total difference between book and taxable income
9	Abnormal total BTB	Residual from $BTB/TA_{it} = \beta T_{ait} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences
10	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
11	Tax Shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data
12	Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Sri Ayu (2017)

### 2.1.5.5 Cash Effective Tax Rate (CETR)

Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan cara untuk mengukur *tax avoidance* dengan rasio pembayaran pajak secara kas (*cash taxes paid*) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (*pretax income*). Pembayaran pajak secara kas terdapat dalam laporan arus kas pada pos “pembayaran pajak” di “ arus kas dari aktivitas operasi”. Sedangkan laba perusahaan sebelum pajak terdapat dalam laporan laba rugi pada pos “laba sebelum pajak penghasilan”.

Menurut Dyreng, *et al* (2010) dalam Handayani (2015), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, *et al*, (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Pembayaran pajak (*cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas keuangan kas perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 yakni sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *cash ETR* menurut Dyreng, *et al* (2010) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan pengindaran pajak oleh perusahaan karena *cash ETR* tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

## **2.1.6 Manajemen Laba**

### **2.1.6.1 Pengertian Laba**

Subramanyam (2012:109) menyatakan bahwa laba merupakan “... ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan serta informasi perusahaan yang paling diminati dalam pasar uang”.

Selanjutnya Mahmud M. Hanafi (2010:32) mengatakan bahwa laba merupakan "... ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya".

Sedangkan menurut Lailan Paradiba (2015) dalam Sri Ayu (2017:63) laba adalah "... item laporan keuangan mendasar dan penting yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks".

Harahap (2009:113) mengemukakan bahwa laba memiliki definisi "... kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi".

Dari beberapa pendapat mengenai laba maka dapat disimpulkan bahwa laba adalah item dan ringkasan hasil bersih dalam laporan keuangan yang berisi kelebihan penghasilan di atas biaya serta mencerminkan prestasi suatu perusahaan dan dapat digunakan dalam berbagai konteks.

#### **2.1.6.2 Jenis-jenis Laba**

##### **1. Laba kotor**

Menurut Subramanyam (2005:120) laba kotor merupakan "... pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Apabila hasil penjualan barang dan jasa tidak dapat menutupi beban yang langsung terkait dengan barang dan jasa tersebut atau harga pokok penjualan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk bertahan."

##### **2. Laba operasi**

Menurut Skousen (2004:243) laba operasi merupakan "... mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba

kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa efisien dan efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya.”

### 3. Laba sebelum pajak

Laba sebelum pajak menurut Subramanyam (2005:25) merupakan “...laba dari operasi berjalan sebelum cadangan pajak penghasilan.”

### 4. Laba bersih

Laba bersih menurut Subramanyam (2005:25) merupakan “...laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.”

#### **2.1.6.3 Kualitas Laba**

Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk formal atas pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan atas kinerja perusahaan selama periode fiskal. Dechow *et al*, (2010) dalam Adiarti (2015:19) mengemukakan bahwa “... laporan keuangan pada hakikatnya harus mampu menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode berjalan”. Oleh karena itu, keandalan laporan keuangan dapat diukur dari relevansi informasi yang disajikan terhadap pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang relevan adalah ketika laporan tersebut dapat membuat pengguna laporan keuangan menghasilkan keputusan yang berbeda. (Adiarti, 2015:20).

Pentingnya fungsi laporan laba untuk pengambilan keputusan inilah yang menjadi pertimbangan baik dari perusahaan maupun pihak investor. Perusahaan harus mampu melaporkan laba perusahaan sebagai cerminan dari kinerja perusahaan, dan pihak investor juga

harus mampu dalam menilai sebuah perusahaan dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Kualitas laba menjadi hal penting dalam pertimbangan ini.

Kualitas laba menurut Amilin (2008) dalam Handoyo (2011) dapat ditentukan dengan “... mengacu pada nilai yang menunjukkan seberapa besar laba tersebut dapat menghasilkan uang kas”.

Sedangkan menurut Grahita (2001) dalam Handoyo (2011) laba akuntansi yang berkualitas dapat didefinisikan sebagai “... laba yang mempunyai sedikit gangguan persepsi didalamnya, dan dapat mencerminkan kinerja keuangan yang sesungguhnya”.

Melanjutkan definisi di atas, Leisa Jang (2007) dalam Handoyo (2008) menyatakan bahwa “... semakin besar gangguan persepsi yang terkandung dalam laba akuntansi, maka semakin rendah kualitas laba akuntansi tersebut”.

#### **2.1.6.4 Pengertian Manajemen Laba**

Manajemen laba didefinisikan oleh Healy dan Wahlen (1999) dalam Stanley (2016:15) sebagai “... suatu hal *judgemental* tentang pengaturan transaksi untuk mengubah laporan keuangan demi mengelabui *stakeholder* mengenai performa perusahaan yang ekonomis atau untuk mempengaruhi kontrak yang bergantung pada angka akuntansi”.

Menurut Wasilah (2004) dalam Stanley (2016:16) manajemen laba merupakan “... proses secara sadar dilakukan oleh manajemen, tetapi masih dalam batasan yang diijinkan oleh Standar Akuntansi Keuangan untuk melaporkan laba pada tingkatan yang diinginkan”.

Manajemen laba menurut Scott (2012) dalam Stanley (2016:16) dapat dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif kontraktual dan perspektif pelaporan keuangan. Dari perspektif kontraktual, manajemen laba berfungsi untuk melindungi perusahaan dari keadaan yang tidak dapat diduga agar kontrak yang biasanya tetap dapat terus terjaga. Sedangkan dari perspektif

pelaporan keuangan, manajemen laba berfungsi untuk mempengaruhi harga saham, dimana perusahaan dapat menciptakan kesan laba yang stabil dan bertumbuh atau sebaliknya untuk menghindari kewajiban kepada pemerintah.

Roychowdhury (2006) dalam Adiarti (2015:24) mendefinisikan manajemen laba sebagai “... penyimpangan dari aktivitas normal perusahaan yang bertujuan untuk mengelabui sekumpulan *stakeholder* dalam menerjemahkan kinerja perusahaan”.

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelabui para stakeholder dalam melaporkan kinerja perusahaan tetapi masih dalam batasan yang diijinkan oleh Standar Akuntansi Keuangan untuk melaporkan laba pada tingkatan yang diinginkan

### **2.1.6.5 Motivasi Manajemen Laba**

Zimmerman (1986) dalam Sulistyanto (2008:89), terdapat tiga hipotesis utama dalam *Positive Accounting Theory* yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan motivasi manajemen laba yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*  
Menyatakan bahwa manajemen yang merencanakan untuk mendapatkan bonus dalam jumlah besar akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal ini dikarenakan indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan cenderung dikaitkan dengan besarnya pendapatan dan meningkatnya asset dari tahun sebelumnya.
2. *Debt (equity) hypothesis*  
Menyatakan ketika perusahaan memiliki rasio *debt to equity* yang besar, maka pihak manajemen akan mengatur jumlah laba yang dihasilkan. Dalam konteks perjanjian hutang, manajemen akan berusaha mengelola dan mengatur laba agar kewajiban hutang yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda hingga tahun berikutnya.
3. *Political Cost Hypothesis*

Menjelaskan bahwa dibandingkan dengan perusahaan kecil, maka perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti tarif pajak progresif, atau kewajiban lain untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan dalam program *Corporate Social Responsibility*.

#### 2.1.6.6 Pengukuran Manajemen Laba

Metode yang digunakan untuk pendeteksian manajemen laba ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Jones (1991) yang dikenal sebagai (*Modified Jones Model*), yang merupakan modifikasi dari *Jones Model*.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:225) menyatakan bahwa "...Model Jones Modifikasi (*Modified Jones Model*) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accrual* ketika *discretion* melebihi pendapatan."

Menurut Sri Sulistyanto (2008:225), langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan *discretionary accruals* (DTA), yaitu:

1. Menghitung nilai total akrual (TAC)

$$TAC = Net\ Income - Cash\ From\ Operations$$

2. Menghitung nilai *current accruals* yang merupakan selisih antara perubahan (D) aktiva lancar (*current assets*) dikurangi dengan kas, dengan perubahan utang lancar (*current liabilities*) dikurangi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

$$Current\ Accruals = D\ (current\ Assets - Cash) - D\ (Current\ Liabilities - Current\ maturity\ of\ Long\ Term\ Debt)$$

3. Menghitung nilai *nondisrectionary accruals* sesuai dengan rumus di atas terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap  $\frac{CurrAcc LT}{TA LT}$  sebagai variabel dependen serta  $\frac{1}{TA LT}$  dan  $\frac{\Delta SalesLt}{TALt}$  sebagai variabel independennya.

$$CurrAcc_{i,t}/TA_{i,t} = \alpha_1 \left[ 1/TA_{i,t} \right] + \alpha_2 \left[ \Delta Sales_{i,t}/TA_{i,t} \right] + \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap variabel itu akan memperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu  $\alpha_1$  dan  $\alpha_2$  yang dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$NDAC_{it} = \alpha_1 \left[ 1/TA_{i,t} \right] + \alpha_2 \left[ \Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{it}/TA_{i,t} \right]$$

Keterangan :

$NDAC_{it}$  = *Nondisrectionary current accruals* perusahaan *i* periode *t*

$\alpha_1$  = *Estimated intercept* perusahaan *i* periode *t*

$\alpha_2$  = *Slope* untuk perusahaan *i* periode *t*

$TA_{i,t-1}$  = *Total assets* untuk perusahaan *i* periode *t*

$\Delta Sales_{i,t}$  = Perubahan penjualan perusahaan *i* periode *t*

$\Delta TR_{i,t}$  = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan periode *t*

4. Menghitung nilai *disrectionary current accruals*, yaitu *disrectionary accruals* yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut :

$$DCA_{i,t} = CurrAcci,t / TA_{i,t-1} - NDCA_{i,t}$$

Keterangan :

$DCA_{i,t}$  = *Disrectionary current accruals* perusahaan *i* periode *t*

$CurrAcci,t$  = *Current Accruals* perusahaan *i* periode *t*

$TA_{i,t-1}$  = Total aktiva perusahaan *i* periode *t*

$NDCA_{i,t}$  = *Nondisrectionary current accruals* perusahaan *i* periode *t*

5. Menghitung nilai *nondisrectionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap  $TAC_{i,t} / TA_{i,t-1}$  sebagai variabel dependennya serta  $1 / TA_{i,t-1}$ ,  $\Delta Sales_{i,t} / TA_{i,t-1}$ , dan  $PPE_{i,t} / TA_{i,t-1}$  sebagai variabel independennya.

$$TAC_{i,t} / TA_{i,t-1} = b_0 [1 / TA_{i,t-1}] + b_1 [\Delta Sales_{i,t} / TA_{i,t-1}] + b_2 [PPE_{i,t} / TA_{i,t-1}] + \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu  $b_1$ ,  $b_2$  dan  $b_3$  yang akan dimasukkan dalam persamaan dibawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$NDA_{i,t} = b_0 [1 / TA_{i,t-1}] + b_1 [\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t} / TA_{i,t-1}] + b_2 [PPE_{i,t} / TA_{i,t-1}]$$

Keterangan :

$b_0$  = *Estimated intercept* perusahaan *i* periode *t*

$b_{1,2}$  = *Slope* untuk perusahaan *i* periode *t*

$PPE_{i,t}$  = Aktiva tetap (*Gross property, plant, and equipment*)

perusahaan *i* periode *t*

6. Menghitung nilai *disrectionary accruals*, *disrectionary long-term accruals*, dan *nondisrectionary long-term accruals*. *Disrectionary accruals* (DTA) merupakan selisih total akrual (TAC) dengan *nondisrectionary accruals* (NDTA). *Disrectionary long-term accruals* (DLTA) merupakan selisih *disrectionary accruals* (DTA) dengan *disrectionary current accruals* (DCA), sedangkan *nondisrectionary long-term accruals* (NDLTA) merupakan selisih *nondisrectionary accruals* (NDLTA) dengan *nondisrectionary current accruals* (NDCA).

Sedangkan Muid (2005) menyatakan untuk mendeteksi apakah perusahaan melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya maka digunakan rumus *total accruals*, dengan menggunakan persamaan:

$$TAC_{PT} = NOI_{PT} - CFFO_{PT}$$

Keterangan :

$TAC_{PT}$  = *Total Accruals* pada periode tes.

$NOI_{PT}$  = *Net Operating Income* pada periode tes.

$CFFO_{PT}$  = *Cash Flow from Operations* pada periode tes.

Total akrual terdiri dari *discretionary* dan *non-discretionary accruals*. Total akrual digunakan sebagai indikator, sebab *discretionary accruals* (DAC) sulit untuk diamati, karena ditentukan oleh kebijakan masing-masing manajer. Menurut Sri Sulistyanto (2008:165) Manajemen laba dapat diukur dengan *discretionary accrual*.

Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjual.

Muid (2005) dalam Galih (2017) merumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$DAC_{PT} = (TAC_{PT} / Sales_{PT}) - (TAC_{PD} / Sales_{PD})$$

Keterangan:

PT : Periode Tes

PD : Periode Dasar

Adanya manajemen laba ditandai dengan DAC positif dan apabila DAC bernilai negatif berarti tidak terdapat manajemen laba.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Manajemen Laba**

Menurut Fan dan wong (2002) dalam Adiarti (2015), bila mayoritas kepemilikan suatu perusahaan berada di tangan keluarga akan menimbulkan pemegang saham pengendali keluarga memiliki insentif untuk menurunkan kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini, keluarga memiliki kemampuan dan insentif untuk mengelola kebijakan pelaporan keuangan dan menentukan bagaimana informasi ditampilkan kepada publik dimana pengarahannya kebijakan ini akan disesuaikan dengan kepentingan pribadinya.

Choi *et al*, (2007) dalam Adiarti (2015) mengemukakan bahwa sebagai pemegang saham pengendali, pihak keluarga memiliki insentif untuk mengarahkan kebijakan yang memberikan keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan ekspropriasi terhadap pemegang saham non-pengendali. Terdeteksinya aktivitas ekspropriasi dapat memicu timbulnya intervensi baik dari pemegang saham non pengendali, *analyst*, maupun regulator. Untuk menghindari risiko litigasi tersebut, keluarga melalui keleluasaan dalam menentukan jabatan dan anggota manajemen perusahaan akan termotivasi untuk menutupi tindakan ekspropriasinya dengan menurunkan kualitas pengungkapan laporan keuangan dan praktik manajemen laba.

### **2.2.2 Pengaruh Hubungan Politik terhadap Manajemen Laba**

Hubungan politik antara perusahaan dengan pemerintah terbukti memiliki beberapa keuntungan bagi perusahaan. Menurut Francis *et al.*, (2012) dalam Butje dan Elisa (2014) hubungan politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Fisman (2001) dalam Stanley (2016) mengemukakan bahwa hubungan politik dapat menjadi sumber daya perusahaan yang berharga bila diasosiasikan dengan nilai reputasi dan fungsi proteksi yang dibangun karena adanya hubungan politik tersebut.

Pernyataan Fisman (2001) diatas sejalan dengan Chaney (2011) dalam Fatimah (2012) bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik merasa aman dari sanksi atau hukuman jika melaporkan laporan keuangan dengan kualitas rendah. Dampaknya adalah perusahaan akan lebih *care less* dalam hal menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga mengakibatkan tingginya manajemen laba.

### **2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Manajemen Laba dengan Agresivitas Pajak sebagai variabel moderasi**

Chen *et al.*, (2010) dalam Stanley (2016) mengemukakan bahwa perusahaan keluarga cenderung memiliki masalah keagenan yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, yang mana hal ini akan ditunjukkan dengan perilaku pengendali yang melakukan ekspropriasi terhadap minoritas. Tindakan tersebut akan meningkatkan potensi biaya yang akan timbul seperti potensi diskon harga saham oleh pemegang saham luar, biaya pinalti ataupun

biaya reputasi jika tindakan tersebut terdeteksi. Hal ini menjadikan insentif untuk mendapatkan tax saving dari penghindaran pajak menjadi potensial untuk menyeimbangkan biaya tersebut. Selain itu, tindakan ekspropriasi tersebut juga dapat disamakan dengan melakukan manajemen laba dengan penggunaan transaksi yang kompleks. Penggunaan transaksi yang kompleks menurut Desai (2004) dalam Stanley (2016) merupakan ciri aktivitas pajak agresif. Sehingga tindakan pajak agresif berfungsi sekaligus menyamakan praktik manajemen laba. Penelitian Murniati (2012), menjelaskan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap pajak agresif. Perusahaan yang didominasi oleh keluarga dimungkinkan memberikan posisi pada anggota keluarga di bagian manajerial sehingga dapat mengutamakan kepentingannya. Hal ini dapat menyebabkan praktik manajemen laba dan manipulasi data lainnya pada perusahaan. Sejalan dengan penelitian Martani (2010) bahwa perusahaan keluarga di Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif, hal ini bisa disebabkan bahwa di Indonesia menganut sistem *self assessment*, juga penelitian Putri (2014) yang menyatakan manajemen laba adalah alat tindakan pajak agresif.

Wirawan dan Sukartha (2017) pada penelitiannya menjelaskan jika manajemen perusahaan dapat dipengaruhi oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham mayoritas yang merupakan keluarga, maka memungkinkan para manajer perusahaan untuk bertindak sesuai keinginan pemilik, termasuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi biaya politik perusahaan.

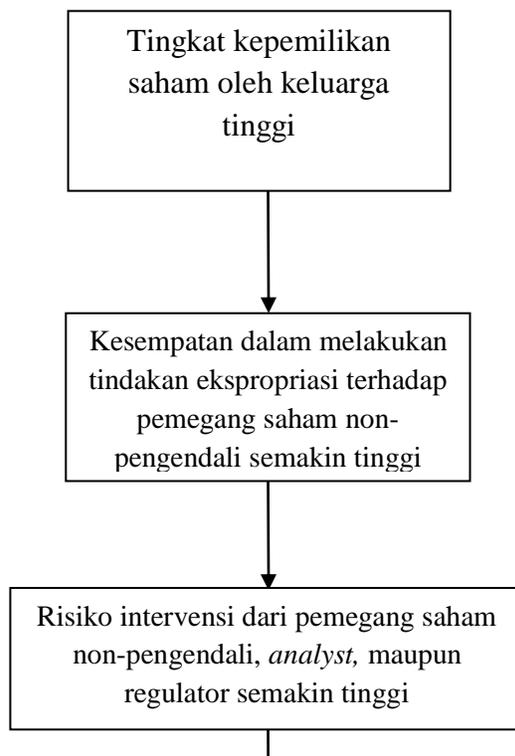
Chen *et al.*, (2010) dalam Stanley (2016) menyatakan bahwa manfaat dan biaya dari tindakan pajak yang agresif akan lebih tinggi dirasakan oleh perusahaan keluarga. Konflik yang ada di dalam perusahaan dinyatakan lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Selain itu, keluarga sebagai pemilik mayoritas sebuah perusahaan tentu memiliki kuasa atau hak suara yang

lebih besar daripada pemilik saham lainnya. Hal ini membuat keluarga pemilik perusahaan dapat menentukan arah kebijakan yang akan diambil perusahaan.

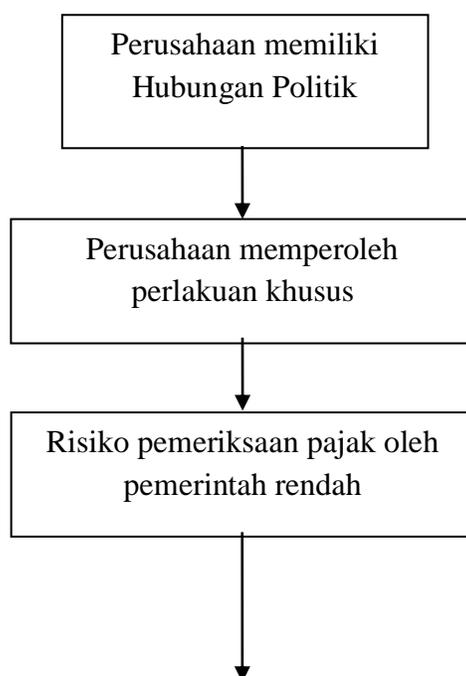
#### **2.2.4 Pengaruh Hubungan Politik terhadap Manajemen Laba dengan Agresivitas Pajak sebagai variabel moderasi**

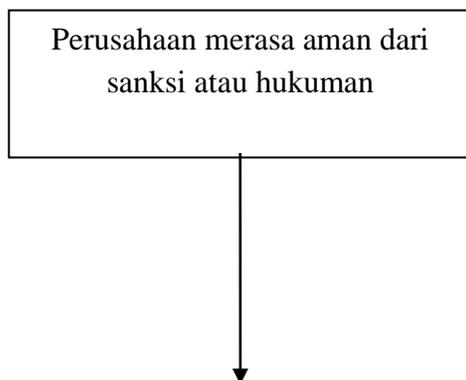
Menurut Francis *et al.*, (2012) dalam Butje dan Elisa (2014) hubungan politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Kehilangan investor akibat penurunan transparansi laporan keuangan dapat digantikan oleh peran pemerintah sebagai penyandang dana utama. Selain itu, perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat tax avoidance yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik. Hal ini disebabkan karena rendahnya risiko pemeriksaan pajak pada perusahaan yang memiliki hubungan politik sehingga perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan manajemen laba dan agresivitas pajak.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Kepemilikan Keluarga terhadap Manajemen Laba

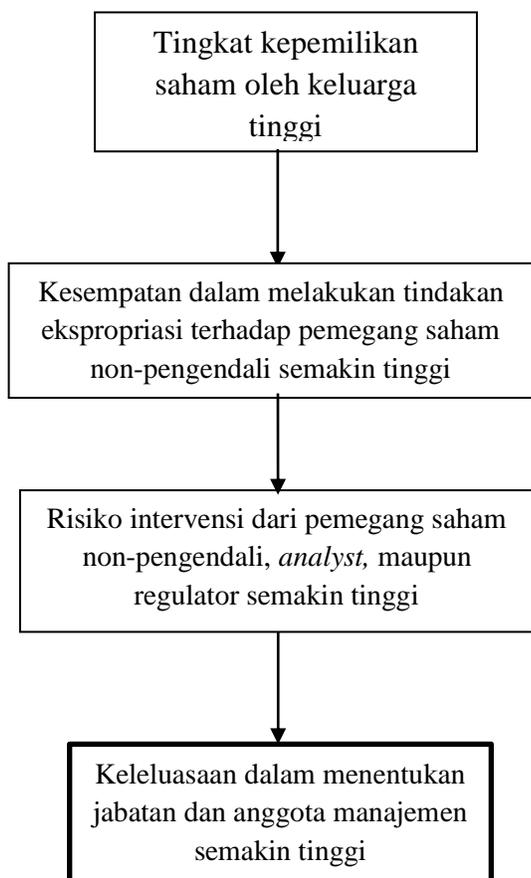


Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Hubungan Politik terhadap Manajemen Laba



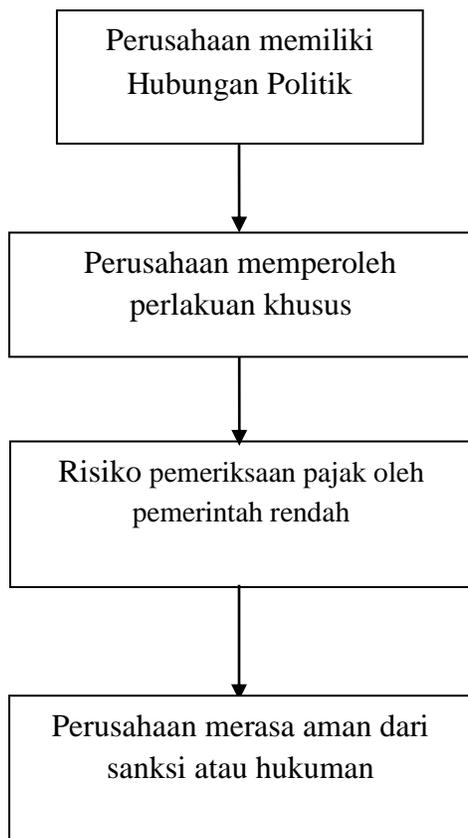


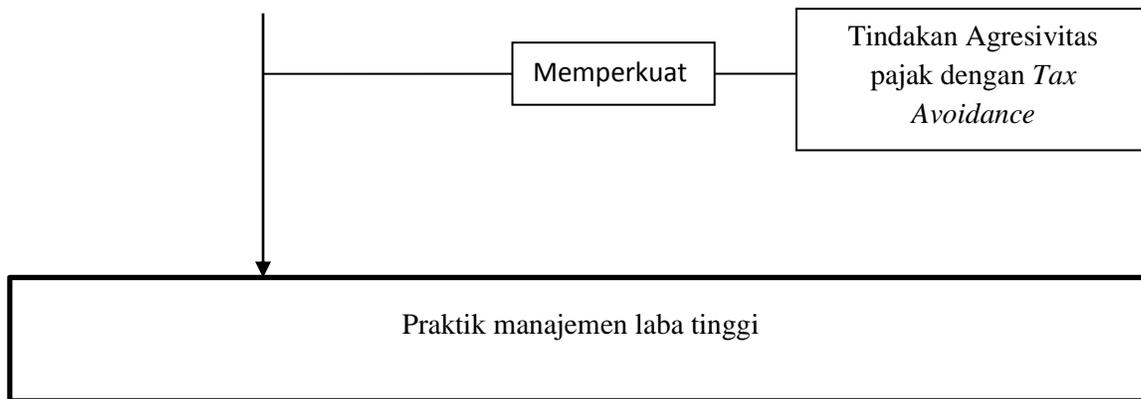
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Agresivitas Pajak sebagai pemoderasi Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Manajemen Laba





Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Agresivitas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Hubungan Politik Terhadap Manajemen Laba





## 2.2 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64): “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas maka penulis mengajukan hipotesis, sebagai berikut:

H1 = Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba

H2 = Hubungan Politik berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

H3 = Agresivitas Pajak memoderasi Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Manajemen Laba

H4 = Agresivitas Pajak memoderasi Pengaruh Hubungan Politik terhadap Manajemen Laba